

**Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021  
Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di  
Desa/Kelurahan (POS PAKDE) Kabupaten Grobogan  
(Studi Kasus Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Desa Tambirejo,  
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan)**

*Implementation Of Regulation Of The Regency Of Grobogan Number 17 Year 2021  
Concerning Population Administration Services In The Village (POS PAKDE)  
Grobogan Regency  
(Case Study Of Family Card Services In Tambirejo Village, Toroh District,  
Grobogan Regency)*

Iva Purwasih\*, Dr. Joko Pramono, S.Sos, M.Si\*\*, Dra. Damayanti Suhita, M.Si\*\*  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
[ivapurwasih650@gmail.com](mailto:ivapurwasih650@gmail.com)

Abstrak

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Skripsi ini mengarah ke bagaimana Implementasi program POS PAKDE di wilayah Desa Tambirejo. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Tambirejo, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Tambirejo, Operator POS PAKDE Desa Tambirejo, dan Masyarakat Desa Tambirejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dengan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, variabel Komunikasi yang dilakukan oleh desa Tambirejo sudah berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan rutin untuk sosialisasi tetapi dari masyarakatnya sendiri kurang kesadaran akan pertemuan rutin yang diadakan oleh kepala dusun. Variabel Sumber Daya, staf yang dimiliki sudah mencukupi, fasilitas sudah memadai, kewenangan dalam program POS PAKDE sudah jelas. Variabel Disposisi, komitmen pegawai dalam pelaksanaan POS PAKDE sudah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, pemberian insentif kepada para pegawai tidak diberikan karena para pegawai sudah mendapat gaji dari jabatan yang ada di kantor desa. Variabel Struktur Birokrasi, SOP belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 tentang POS PAKDE, penyebaran tanggung jawab yang dilakukan yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun ke Desa. Desa untuk penyebaran tanggung jawab dari Kepala Seksi Pemerintahan dan juga Operator POS PAKDE.

Kata Kunci : Implementasi, POS PAKDE, Kartu Keluarga.

### *Abstract*

*Grobogan Regent Regulation Number 17 of 2021 concerning Population Administration Service Posts in Villages/Kelurahan (POS PAKDE) aims to bring population administration and civil registration services closer. This thesis leads to the implementation of the PAKDE POS program in the Tambirejo Village area. The subjects in this study were the Secretary of Tambirejo Village, Head of Government Affairs of Tambirejo Village, PAKDE POS Operators in Tambirejo Village, and Tambirejo Village Community. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Qualitative data analysis techniques through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results showed that the communication variable carried out by the village of Tambirejo had run smoothly and was carried out regularly for socialization but the people themselves were less aware of the routine meetings held by the hamlet head. Variable Resources, the staff is sufficient, the facilities are adequate, the authority in the PAKDE POS program is clear. Disposition variables, employee commitment in implementing PAKDE POS has provided effective and efficient services, incentives for employees are not given because employees have received salaries from positions in the village office. Variable Bureaucratic Structure, SOP is not fully in accordance with Grobogan Regent Regulation Number 17 of 2021 concerning PAKDE POS, the distribution of responsibilities carried out is from the Population and Civil Registration Office down to the Village. Village for the distribution of responsibilities from the Head of the Government Section and also the PAKDE POS Operator.*

*Keywords: Implementation, PAKDE POS, Family Card.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai wilayah sangat luas, jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar. Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang masyarakatnya tersebar dan mengakibatkan tidak meratanya seluruh penduduk. Berbagai permasalahan mengakibatkan banyaknya permasalahan yang dijumpai. Kerap muncul permasalahan agar pemerintah dapat segera bertindak untuk mengambil suatu kebijakan.

Penduduk Indonesia paham akan pentingnya administrasi kependudukan, saat ini akses yang didapat dalam pembuatan administrasi kependudukan yaitu di Kecamatan ataupun di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota saja. Adapun hal yang menjadikan sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Grobogan. Permasalahan ini sangat banyak dijumpai di daerah-daerah desa.

Pendaftaran penduduk merupakan perihal tanggung jawab dari pemerintah kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa sebagai tokoh utama dalam pendaftaran administrasi kependudukan, makadari itu setiap warga yang akan mendaftar secara administratif sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Seluruh pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien supaya para

penduduk dapat merasa pelayanan yang sangat memuaskan dari pemerintah yang bertugas.

Program POS PAKDE menjadikan jalan keluar dari berbagai permasalahan dalam melakukan pendaftaran administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Grobogan, yaitu permasalahan pelayanan dalam KK. Adanya ketersediaan data dan informasi terkait dari Pemerintah Desa Tambirejo dapat melaksanakan hak publiknya agar dapat memperoleh informasi maupun berita yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Maka dari itu, perkembangan penduduk akan berhasil jika memperoleh pengelolaan data kependudukan yang berukuran tinggi dapat terlaksana dengan baik, sehingga akan menjadikan informasi yang sangat bermanfaat dalam memberikan keberhasilan pembangunan administrasi kependudukan.

Permasalahan yang masih dijumpai di Desa Tambirejo yaitu sebagian besar warga belum mengetahui program layanan POS PAKDE, pelatihan dalam mencetak mandiri dengan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) masih kurang, masih banyak warga yang malas datang ke kantor desa hanya menitip ke pegawai kantor desa, jadi hal ini belum sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* yang telah dibuat. Sesuai dengan pernyataan dari bapak Kusyono selaku Operator Desa POS PAKDE di Desa Tambirejo yaitu "Kebanyakan warga yang membuat administrasi kependudukan hanya menitip berkas-berkas yang dibutuhkan langsung ke pegawai kantor desa saja". Wawancara pra

skripsi pada tanggal 08 Februari 2022 pukul 09.30 WIB.

Adanya permasalahan tersebut maka pelayanan penerbitan KK melalui POS PAKDE menjadi kurang optimal. Disisi lain permasalahan ini sering muncul karena tidak adanya ketegasan yang diterapkan bagi para warga yang akan membuat KK contohnya Sosialisasi secara langsung yang menjadikan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu implementasi. Program POS PAKDE ini belum sepenuhnya maksimal dan menyeluruh. Berikut data pemohon pelayanan penerbitan Kartu Keluarga:

**TABEL 1**  
**Jumlah Pemohon Kartu Keluarga POS PAKDE Desa Tambirejo Pada Bulan Juni 2021 - Januari 2022**

Bulan	Jumlah
Juni 2021	1
Juli 2021	1
Agustus 2021	1
September 2021	10
Oktober 2021	4
November 2021	6
Desember 2021	5
Januari 2022	5
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

Sumber: Desa Tambirejo, Kec. Toroh

Dari keseluruhan data awal dibukannya layanan POS PAKDE dalam pelayanan KK pada bulan Mei 2021 sudah tercatat 33 pemohon KK dalam membuat Administrasi Kependudukan melalui POS PAKDE. Dilihat dari data pemohon kartu keluarga melalui POS PAKDE dalam waktu delapan bulan masih minim masyarakat dalam mendaftar kartu keluarga melalui POS PAKDE. Maka dari itu peneliti mengambil studi kasus pendaftaran kartu keluarga di

Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan dalam Pelayanan KK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) di Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan dalam Pelayanan KK.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik yaitu keputusan - keputusan yang mewajibkan bagi setiap orang harus memiliki tataran strategis atau berukuran tinggi yang membuat pemegang kekuasaan publik yang menjadikan tujuan tersebut dapat tercapai. Sebagaimana keputusan yang mewajibkan bagi publik, maka dari itu kebijakan publik haruslah dibuat bersama dengan pemegang kekuasaan tertinggi dalam politik.

Bagi setiap orang harus menerima mandat dari publik atau orang banyak yang pada umumnya melalui suatu proses pemilihan atau pemungutan suara. Fokus terpenting dalam kebijakan publik disuatu negara modern adalah pelayanan publik. Kebijakan publik dapat dijalankan

sesuai dengan serangkaian pelaksanaan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah yang mempunyai sasaran atau orientasi tertentu demi kepentingan seluruh rakyat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Jika sebuah kebijakan diambil dengan tepat, maka kemungkinan besar kegagalan masih bisa teratasi dengan baik, jika proses implementasi tidak tepat maka kegagalan suatu implementasi jauh lebih besar tingkat kegagalannya. Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Tangkilisan, 2003:2).

Beberapa ahli politik yang memberikan minat untuk mengkaji suatu kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut: Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan, Tahap Evaluasi Kebijakan.

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295). Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik karya Suatu keputusan yang dimaksud yaitu untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Guna merealisasikan pencapaian

tersebut, maka diperlukan serangkaian kegiatan secara maksimal, sehingga tahapan yang penting dari berbagai aktivitas dapat mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

## **C. Indikator Implementasi**

George C. Edwards III mempertimbangkan 4 variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Indikator yang mempengaruhi terjadinya implementasi menurut George C. Edwards III yaitu sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi dimaksud pada bagaimana isi, tujuan, manfaat, dampak sasaran maupun cara pencapaian target implementasi. Masing-masing kebijakan dapat dijalankan dengan baik, jika didalam indikator komunikasi dilakukan dengan tepat antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan dari program POS PAKDE dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat mengurangi adanya ketidaktahuan atas kebijakan dalam program tersebut. Terdapat 3 hal utama dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan.

### **2. Sumber Daya**

Jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya maka kemungkinan besar implementasi tidak akan berjalan lancar. Suatu kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar dapat memberikan yang terbaik dari sumber daya tersebut. Terdapat empat faktor penting dalam sumber daya

yaitu staf, kewenangan, informasi dan fasilitas.

### 3. Disposisi

Disposisi yang dimiliki pelaksana kebijakan adalah komitmen dan pemberian insentif. Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi dan mempunyai semangat kerja sesuai dengan tugasnya maka dapat mempertahankan diantara hambatan yang ditemui dalam program tersebut. Jika seorang pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan variabel dalam mengimplementasikan kebijakan yang mengikat dan relevan terhadap suatu implementasi. Adanya prosedur mekanisme yang memiliki standar akan menjadi pedoman bagi implementasi dalam melakukan suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi yang terlalu berbelit maka akan menimbulkan kelemahan oleh pengawasan dan mengarah kepada peraturan yang berlebihan. Aspek ini terbagi menjadi dua hal penting yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kebijakan.

### D. Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan (POS PAKDE)

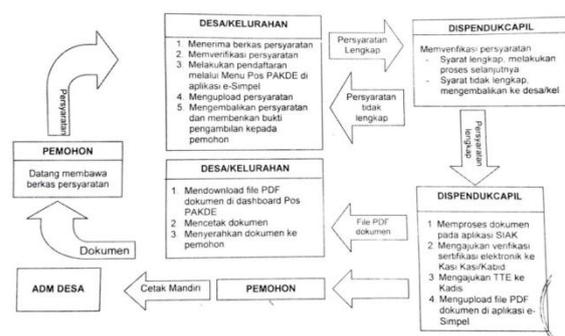
Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) adalah suatu tempat atau wadah pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan juga secara langsung di desa/kelurahan, merupakan inovasi terbaru yang dilaksanakan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Tujuan adanya POS PAKDE ini untuk mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang ingin mendaftarkan dokumen kependudukan, cukup datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan, tidak perlu mendaftar ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau kecamatan.

POS PAKDE Kabupaten Grobogan melayani berbagai administrasi kependudukan yaitu sebagai berikut: Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran.

Berikut merupakan alur pelayanan Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE) :

**GAMBAR 1**  
**ALUR PELAYANAN POS PAKDE**



Sumber : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang POS PAKDE

### E. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas bagi seluruh keluarga yang memuat data tentang nama, agama, tempat tanggal lahir, susunan

dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga. Setiap keluarga wajib mempunyai kartu keluarga yang memuat semua anggota dari ayah, ibu ataupun anak. Kartu keluarga sangat penting dalam pendataan keluarga yang memang harus didata oleh pemerintah. Kartu keluarga dapat dibuat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan kecamatan, tetapi dengan adanya POS PAKDE warga dapat membuat Administrasi Kependudukan hanya di kantor desa ataupun kelurahan saja.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif berdasarkan fakta - fakta yang tampak (Sugiyono, 2018:15).

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah yang di mana penelitian dilakukan. (Moleong, 2013:15) lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

### **C. Sumber Data**

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018:456). Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti secara

langsung dari sumber utama objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilakukan secara langsung atau *face to face* kepada informan.

Data sekunder menurut yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono (2018:456). Contohnya seperti data yang diperoleh dari orang lain atau yang berbentuk dokumen. Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai implemmtasi kebijakan publik.

### **D. Teknik Penentu Informan**

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono, (2018:144) pengertian *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sugiyono, (2012:54) *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data yang pada awalnya jumlah sedikit lama-lama menjadi besar dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung dalam permasalahan terkait POS PAKDE.

Informan merupakan seseorang yang mengetahui tentang segala persoalan tertentu yang dapat memberikan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Pemilihan informan dalam penelitian ini, dilakukan dengan kegiatan mengajukan pertanyaan yang

dilakukan dengan informan diantaranya yaitu: Sekretaris Desa Tambirejo, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tambirejo, Operator Desa POS PAKDE ( 1 Orang), Masyarakat Desa Tambirejo (7 Orang).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, (2018:140), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, (2006:196). observasi dilakukan dengan tak struktur, dalam melaksanakan pengamatan ini pengobservasian tidak menyediakan berbagai macam aspek yang akan diobservasi. Pengobservasian ini menjadi catatan seluruh kegiatan pelayanan POS PAKDE yang diharuskan melakukan observasi. Peneliti mendapatkan informasi melalui observasi selama pengumpulan data penelitian dilaksanakan..

Menurut Sugiyono, (2006:240) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa dikumpulkan melalui berbagai bersumber misalnya arsip dan dokumen, baik yang berada di Desa Tambirejo ataupun yang ada diluar.

#### **F. Uji Validitas Data**

Dalam uji validitas data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber yaitu peneliti menggunakan beberapa sumber data saat mengumpulkan informasi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2012:337) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai. Aktivitas dalam analisi data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi Implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK meliputi: penyampaian, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Penyampaian yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yaitu dengan memberikan sosialisasi pertemuan yang dihadiri oleh seluruh kepala desa di kabupaten Grobogan. Penyampaian yang dilakukan oleh Desa Tambirejo dalam mensosialisasikan program POS

PAKDE dalam pelayanan KK dilakukan secara bertahap kepada masyarakat dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara langsung salah satunya melalui perangkat desa melakukan pertemuan rutin kepada kepala dusun, setelah itu kepala dusun memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan rutin seperti arisan yang dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi tidak langsung dilakukan oleh perangkat desa seperti melalui media sosial yaitu *story whatsapp, facebook, link, website* dan juga *twitter*.

Sosialisasi tidak langsung dilakukan agar warga dapat menerima informasi secara cepat dan tepat. Tetapi disamping itu tidak semua masyarakat mengerti tentang media sosial. Masih banyak masyarakat kurang tahu tentang pelayanan POS PAKDE. Untuk penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan dalam penyampaian POS PAKDE kurang maksimal. juga mesin ADM yang biasanya mengalami kendala dalam setiap pencetakan. Kebanyakan masyarakat tidak mengentahui tentang sosialisasi program POS PAKDE di Desa Tambirejo..

Kejelasan informasi dalam pelaksanaan program POS PAKDE dalam pelayanan KK melalui penjelasan secara mendalam dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku agar dapat dimengerti dan dipahami oleh pegawai dan juga masyarakat desa Tambirejo dalam menjalankan program POS PAKDE dalam pelayanan KK. Kejelasan informasi tidak hanya meliputi aturan-aturan yang telah ditentukan

dan juga berlaku, tetapi kejelasan informasi juga dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Konsistensi informasi di Desa Tambirejo dalam pelaksanaan program POS PAKDE dalam pelayanan KK terdiri dari beberapa peraturan implementasi POS PADE dalam pelayanan KK. Konsistensi informasi dapat berjalan lancar jika pelaksana implementasi memberikan informasi yang cukup jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Agar dapat menciptakan Pos Pelayanan Administarsi Kependudukan di Desa/Kelurahan yang cepat dan mudah maka desa harus memberikan konsistensi informasi yang relevan agar masyarakat dapat paham akan adanya program POS PAKDE.

## **2. Sumber Daya**

Sumber Daya Implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK meliputi: staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dalam implementasi program POSPAKDE dalam pelayanan KK para staf tidak diberlakukan pelatihan khusus mengenai operator desa, tetapi staf harus memiliki keahlian dibidang pengoperasian komputer yang bertujuan agar para staf dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia dalam implementasi program POS PAKDE dalam pelayanan KK harus mencukupi.

Informasi adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Informasi yang dilakukan oleh Desa Tambirejo

dalam program POS PAKDE dalam pelayanan KK disampaikan dengan sangat relevan dan jelas. Penerbitan KK dilakukan pada jam kerja yang sesuai pada umumnya.

Kewenangan impelentasi program POS PAKDE dalam pelayanan KK di Desa Tambirejo dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Pemegang wewenang dalam program POS PAKDE di desa Tambirejo yaitu operator POS PAKDE dan Kepala Urusan Pemerintahan yang memegang kendali data administrasi kependudukan melalui program POS PAKDE.

Sumber daya fasilitas adalah sumber daya peralatan pendukung pegawai dalam melaksanakan mekanisme pelayanan yang baik yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Saranan dan prasarana yang dimiliki Desa Tambirejo sudah sesuai dengan kebutuhan untuk saat ini meskipun terkadang mengalami masalah pada server atau jaringan eror. Fasilitas yang dimiliki dalam pelaksanaan impelementasi POS PAKDE yang utama yaitu komputer dua buah, kertas untuk pencetakan dan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Desa (ADM Desa). Disamping itu masih ada kendala seperti jaringan eror atau mesin macet pada saat pencetakan

### **3. Disposisi**

Disposisi Implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK meliputi: komitmen pegawai dan insentif pegawai. Komitmen antar pegawai operasional POS PAKDE dalam pelayanan KK di Desa Tambirejo dilakukan secara efektif

dan efisien. Pelaksanaan POS PAKDE dalam pelayanan KK berjalan dengan lancar karena adanya komitmen yang tinggi dari pegawai dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen dilakukan agar data-data dari pemohon bisa terjaga dengan baik.

Insentif pegawai pelaksana program POS PAKDE dalam pelayanan KK tidak adanya insentif tambahan dikarenakan bagian dari tugas pekerjaan dalam melayani masyarakat pada saat pembuatan KK sudah cukup mudah. Untuk operator yang ditugaskan ke Capil diberi insentif uang transportasi dan yang ditugaskan desa hanya mendapat gaji sesuai dengan jabatan karena operator desa merangkap tugas menjadi perangkat desa.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi Implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK meliputi: *Standar Operasional Prosedures (SOP)* dan Fragmentasi (Penyebaran tanggung jawab). *Standar Operasional Prosedures (SOP)* sangat berperan penting dalam implementasi POS PAKDE yang mengatur tentang tatacara bagaimana pembuatan administrasi kependudukan khususnya pembuatan KK. Misal dalam pembuatan KK pemohon bisa mendaftar langsung ke kantor desa tidak perlu ribet menitip seperti dulu dan para pemohon bisa mencetak sendiri di mesin ADM desa yang mencetak berbagai administrasi kependudukan khususnya pembuatan KK. Pemohon maupun operator desa masih belum sesuai dengan SOP yang berlaku seperti masih ada yang menitip berkas persyaratan. Terdapat keterlambatan

perekaman karena jaringan eror atau mesin ADM Desa sedang bermasalah.

Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab) kegiatan ini sangatlah mempengaruhi dalam implemantasi kebijakan program POS PAKDE dalam pelayanan KK. Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Grobogan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan bahwa POS PAKDE yang selanjutnya diintruksikan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertata sesuai dengan struktur organisasi yang sudah disahkan di dalam peraturan POS PAKDE.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Komunikasi, terdiri dari tiga faktor yaitu penyampaian, kejelasan dan konsistensi informasi. Penyampaian yang dilakukan oleh kantor desa Tambirejo sudah cukup baik yaitu dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan pertemuan rutin yang diadakan setiap sebulan sekali. Penyampaian secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui media sosial yaitu *story whatsapp, facebook, link, website dan juga twitter*. Kejelasan informasi dalam program POS PAKDE masyarakat kebanyakan belum jelas karena masyarakatnya sendiri kurang memahami pentingnya pertemuan rutin dengan kepala dusun dikarenakan adanya beberapa

permasalahan seperti pekerjaan yang memungkinkan para masyarakat tidak dapat mendatangi pertemuan tersebut. Konsistensi informasi yang dilakukan sudah cukup baik. Para aparatur desa sudah melakukan sosialisasi rutin terkait program POS PAKDE dalam pelayanan KK dan pelayananpun cukup mudah.

2. Sumber Daya, terdiri dari empat faktor yaitu: staf, informasi, kewenangan Dan fasilitas. Staf atau Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK yaitu membutuhkan dua operator yang menangani program POS PAKDE. Informasi sudah dilakukan dengan cukup relevan dan jelas dalam pelaksanaan implementasi POS PAKDE. Kewenangan yang dilakukan dalam implementasi POS PAKDE dalam pelayanan KK yaitu operator POS PAKDE dan Kepala Seksi Pemerintahan Fasilitas dalam menunjang program POS PAKDE di Desa Tambirejo dalam program POS PAKDE dalam pelayanan KK sudah cukup menunjang dalam memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat..

3. Disposisi, terdiri dari dua faktor yaitu: komitmen pegawai dan insentif pegawai. Komitmen yang ditanamkan oleh operator POS PAKDE sudah cukup baik yaitu selalu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat desa Tambirejo. Menjaga keakuratan data pemohon juga merupakan komitmen yang selalu ditanamkan oleh operator POS PAKDE namun

- belum ada pemberian insentif yang diberikan kepada pegawai atau staf yang merangkap tugas sebagai operator desa dikarenakan sudah memiliki gaji sesuai dengan jabatan.
4. Struktur Birokrasi terdiri dari dua faktor yaitu: *Standar Operasional Prosedures* (SOP) dan Fragmentasi (penyebaran atanggung jawab). Para staf ataupun masyarakat masih belum melakukan SOP sesuai dengan peraturan Bupati seperti para pemohon harus membawa sendiri persyaratan lengkap ke kantor desa tetapi masyarakat masih banyak yang menitip persyaratan dan sedikit memberi imbalan untuk jasa transportasi. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yaitu dari pihak Pemerintah Pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan disampaikan ke desa sudah cukup baik sudah sesuai dengan kewenangan dari pemerintah pusat.

## B. Saran

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memperoleh saran yaitu:

1. Kepada operator POS PAKDE dalam pelayanan KK di Desa Tambirejo untuk tetap mempertahankan konsistensi pelayanan yang selalu memberikan kepuasan bagi masyarakat desa Tambirejo dalam pelayanan KK melalui program POS PAKDE.
2. Untuk komunikasi dari Aparatur Pemerintah Desa Tambirejo diharapkan dalam pelayanan KK dapat meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan memberikan waktu atau pertemuan khusus untuk masyarakat yang memang tidak mengikuti pertemuan rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali, tetapi diharapkan penyampaian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dilakukan secara rutin seperti mengecek tentang bagaimana pelaksanaan POS PAKDE di setiap desa.
3. Untuk sumber daya diharapkan adanya pengecekan rutin atau servis mesin ADM Desa agar pencetakan berjalan lancar dan untuk server atau jaringan juga diperbaiki agar tidak mengalami kendala signal.
4. Untuk *Standar Operasional Prosedures* (SOP) diharapkan masyarakat ataupun pegawai kantor desa dapat menjalankan program POS PAKDE sesuai dengan SOP yang berlaku. Bagi masyarakat Desa Tambirejo diharapkan dapat membuat atau mendaftar KK melalui POS PAKDE dengan cara datang langsung ke kantor desa dan aparat pemerintah desa memberikan pelatihan khusus tentang bagaimana mencetak administrasi kependudukan dengan mesin ADM desa agar para masyarakat dapat mencetak sendiri KK masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afan, G. ( 2009). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Transisi Menuju Demokrasi.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.

### Undang – Undang

- Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021  
Tentang Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa/Kelurahan (POS PAKDE)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan